

**PENTINGNYA PERAN KELEMBAGAAN  
DALAM KELOMPOK TANI HUTAN DI KABUPATEN PANDEGLANG**

**(Oleh : Asep Suhendar, PKSM Kecamatan Sobang Kab. Pandeglang Sobang DLHK Provinsi Banten)**

Assalamua'laikum Wr, Wb.

Puji syukur kehadirat ALLAH SWT, karena dengan karunia dan rahmat nya kami dapat menyelesaikan Karya Tulis ini tepat waktu. seiring perjalanan panjang yang berawal dari pengurus KTH Bina lestari sebagai Sekertaris dari tahun 2010 dan di tahun 2012 dipromosikan menjadi sebagai PKSM (Penyuluh Kehutanan Swadaya Masyarakat) hingga saat ini, Dan berkat rahmatnya juga yang telah memdapatkan ilmu pengetahuan tentang Kehutanan, mulai dengan mengikuti beberapa bimbingan teknis, Pendidikan dan Pelatihan hingga mengikuti kegiatan-kegiatan yang difasilitasi oleh Dinas Kehutanan hingga Kementerian Kehutanan, dan dengan perubahan dalam perbagikan regulasi birokrasi saat ini yang bergabung dengan Lingkungan Hidup tentu banyak hal-hal yang perlu dikembangkan lagi secara luas di masyarakat, seperti Program Kampung Iklim, Bank Sampah, Jasa lingkungan, Kakisu, kakija, dan lain-lain, kesemuannya itu dalam rangka pelestarian Lingkungan Hidup yang berkelanjutan untuk menopang segala sesuatu yang ada disekitar kita, meliputi unsur biotik, abiotik dan unsur sosial budaya, yang memiliki hubungan timbal balik dengan manusia dan prilakunya. Begitupun dengan program kehutanan antaranya Kegiatan Pembangunan kehutanan yang berbasis masyarakat diantaranya Hutan Kemasyarakatan, Hutan Desa, Pembangunan Kebun Bibit Rakyat (KBR) dan penanaman bibit KBR, Kelompok Usaha Produktif (KUP), Pengembangan Sentra Penyuluhan Kehutanan Pedesaan, Posluhutdes, Unit Percontohan Penyuluhan Kehutanan (UPPK), Pembuatan Bangunan konservasi tanah, Hutan Rakyat, Pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK), Jasa Lingkungan, Hutan Tanaman Rakyat (HTR), Program Bantuan Sosial Kementerian Kehutanan, Perhutanan Sosial. Karena konsep Kehutanan merupakan aspek ekologis yang berada diatas permukaan bumi maka kehutanan dari segi pembentukannya terdiri dari 2 (dua) cara, yaitu terbentuk alamiah dan buatan. Dengan perkembangan teknologi telah menciptakan teori yang dapat mengembalikan fungsi hutan alam, dengan dasar tersebut pengolahan hutan lebih dititikberatkan kepentingan secara menyeluruh. Maka bumi dengan segala macam di dalam dan dipermukaan dapat dimanfaatkan dengan sebesar-besarnya oleh manusia sebagai penghuninya. Pengolahan hutan sebaiknya diselaraskan dengan pengolahan sumber daya alam lainnya, hingga pemanfaatan sumber daya dapat terjalin kelestariannya dengan baik dan menguntungkan. Bagi kehidupan di bumi hutan merupakan sebagai "kebutuhan pokok" yang tidak ternilai harganya karena fungsi hutan merupakan bagi kelangsungan hidup dan kehidupan umat manusia di muka bumi, bayangkan andaikan saja bumi tidak ada hutan, maka dapat dipastikan dunia ini akan terasa sangat panas dan nyaman serta kesejukan, keseimbangan tidak ada, maka manfaat hutan yang sangat dibutuhkan manusia dan mahluk hidup lainnya, seperti : hutan sebagai penyerap dan penyimpan karbon, menjadi gantungan hidup, untuk memenuhi kebutuhan manusia, menjadikan habitat binatang dan hewan, pencegah banjir, sumber oksigen, sebagai sumber cadangan air, mencegah erosi dan tanah longsor, tempat wisata alam, tempat riset dan studi biologi, mengatur iklim dan lain sebagainya. Manfaat hutan memang tiada duanya, tanpa hutan maka kehidupan manusia akan punah dan mengalami kesulitan yang cukup banyak. Menjaga hutan agar tetap lestari adalah berbagai program pemerintah seluruh dunia. Indonesia merupakan Negara yang terdiri dari pulau-pulau dan hutannya terdapat didalamnya, maka kita harus bangga sebagai rakyatnya yang tinggal di

Negara Indonesia tentunya dengan mensyukuri atas rahmat yang diberikan kepada kita dengan menunaikan kewajiban bentuk ketaatan dalam beribadah kepada Allah SWT.

Semua bentuk kegiatan dalam ruang lingkup Lingkungan Hidup dan Kehutanan harus memiliki konsep tata kelola dengan baik, agar peran pemerintah sebagai yang memfasilitasi kebutuhan kegiatan-kegiatan kemasyarakatan sesuai dengan harapan dan program pemerintah dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan juga Kementerian Lingkungan hidup dan Kehutanan “Hutan Lestari Masyarakat Sejahtera” dan “ Menjaga Lingkungan sama dengan menjaga hidup Kita” serta amanah Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 atas perubahan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Ketika antara pemerintah dan masyarakat memiliki pola pandang dan wawasan yang sama, maka peran penting kelembagaannya pun harus ada sebagai bentuk legal aspek dalam menyelaraskan program-program kehutanan yang berkelanjutan. Dengan demikian peran penting penyuluhan pun harus selalu menjadi bagian penyambung kesinambungan yang berkaitan dengan kemudahan akses pelaku utama dan pelaku usaha ke sumber informasi, teknologi, sumberdaya lainnya. Maka hadirnya Penyuluh Kehutanan Swadaya Masyarakat (PKSM) merupakan ujung tombak antara pemerintah dengan masyarakat sebagai pelaku utama dan pelaku usaha, eksistensi penyuluhan dan pendampingan melekat memiliki fungsi memfasilitasi proses pembelajaran pelaku utama dan pelaku usaha, meningkatkan kapasitas pelaku utama dan pelaku usaha, membantu pelaku utama dan pelaku usaha menumbuhkan kembangkan organisasinya, membantu menganalisa dan memecahkan masalah dan merespon peluang dan tantangan yg dihadapi pelaku utama dan pelaku usaha, menumbuhkan kesadaran kelestarian fungsi lingkungan, sehingga terbentuknya nilai-nilai kelembagakan budaya pembangunan kehutanan yang berkelanjutan.

Seiring peran sebagai Penyuluh Kehutanan Swadaya Masyarakat sangat tidak mudah, perlu ditempuh dengan kesabaran, ketekunan dan keiklasan dalam menjalankannya. Animo yang berkembang di masyarakat pun sangatlah berbeda-beda mulai dari perilaku, budaya, kebiasaan, sikap dan prinsip. Hal demikian perlunya keuletan dalam memberikan penyuluhan, karena berdasarkan survey kelembagaan di masyarakat cukup banyak dan masih ditemukan sebagai catatan kritis pembangunan kehutanan berbasis masyarakat diantaranya : sisi kelembagaan ekonomi masyarakat atau Kelompok Tani Hutan masih lemah, dari sisi sosial politik dalam kebijakan pembangunan kehutanan masyarakat belum memiliki posisi sebagai subjek secara utuh sehingga keinginan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat disekitar hutan, maupun peningkatan pendapatan negara jelas meminimalkan semangat ekologis. Terbukti dengan keberadaan kelembagaannya pun masih jauh dari menegemen administrasi secara keorganisasian, sehingga untuk teregistrasi di pemerintah dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan masih dalam pertimbangan, karena syarat formil kelembagaannya pun belum lengkap. Yang harus diwujudkan dalam keseriusan dan kesabaran yaitu melalui **pendampingan melekat**, sehingga kesan yang didapat nilai silaturahmi penuh arti. Dengan cara proses tersebut maka segala permasalahan akan menjadi persoalan yang harus dipecahkan bersama.

Dalam melaksanakan penyuluhan yang bersifat pendampingan melekat, tentu ada kiat-kiat khusus sebagai strategi diplomasi, yaitu dengan cara sederhana dalam melakukan analisis SWOT untuk mengevaluasi kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman dalam mengurus kelembagaan kemasyarakatan atau Kelompok Tani Hutan sebagai binaan. Merasakan kondisi yang perlu kiranya kita benahi maka sebagai penyuluh sepatutnya mulai bergerak dari membangun pola pikir dan cara pandang demi merespon wawasan yang lebih baik dari sebelumnya, tentunya pola penyuluhanpun harus dipola dari sisi aspek Sumber Daya manusianya yang memiliki karakteristik pengetahuan, budaya dan kearifan lokal yang berbeda-beda pula. Karna secara mendalam kelembagaan masyarakat yang berkembang dalam kepengurusan Kelompoknya masih dinilai memiliki tujuan dan struktur organisasi saja, akan tetapi belum sesuai harapan. Kelompok belum berperan kepada tahap sebagai wahana belajar, kerja sama, dan unit usaha produksi bersama para anggota. Struktur Kelompok tani Hutan yang kami amati hanya menjadi prasyarat administrasi sebuah organisasi, hingga berdampak pada rendahnya peran dan fungsi pengurus Kelompok Tani Hutan menyebabkan rendahnya pula tingkat kedinamisan. Partisipasi seluruh anggota kelompok Tani Hutan merupakan faktor kedua yang memiliki pengaruh langsung terhadap kfasitas kelembagaan Kelompok Tani Hutan. Secara umum, partisipasi anggota dalam setiap kegiatan Kelompok Tani masih rendah, terutama partisipasi dalam perencanaan, pengawasan dan pemeliharaan hasil kegiatan Kelompok tani Hutan. Namun demikian, partisipasi dalam kegiatan dan pemanfaatan hasil kegiatan mengalami peningkatan ketika ada program bantuan pemerintah dalam bentuk sarana dan prasarana usaha tani, ini terbukti hasil diskusi dengan pengurus atau dan para anggota yang diperoleh hasil kunjungan.

Metode sederhana seperti Analisi SWOT kelembagaan bisa mengurai sedikit persoalan yang terjadi pada kondisi Kelompok Tani sekarang ini.

- **Streangth (Kekuatan)** pada umumnya masyarakat memiliki kemampuan bertani, ketergantungan terhadap lahanpun menjadi usaha unggulan
- **Weakness (kelemahan)** rendahnya nilai kelembagaan untuk membangun kebersamaan secara terorganisis
- **Opportunities (peluang)** perhatian pemerintah dalam menggulirkan program kegiatan kemasyarakatan masih terus berlanjut
- **Treaths (ancaman)** dengan kelemahan dari segi kelembagaan maka muncullah beberapa masalah yang mengarah kepada, berubahnya fungsi lahan yang dikonversi kepada tanaman lain seperti sawit, palawija walaupun tidak mengurangi kegiatan usaha taninya tapi yang paling miris lepasnya lahan kepada para pengembang yang secara kepemilikan sudah bukan haknya lagi

Maka kedepannya peran penting Penyuluh Kehutanan Swadaya Masyarakat, harus mulai menitik beratkan kepada kelompok binaannya hingga kelola kelembagaan kelompok tani hutan yang sesuai harapan pemerintah mulai dari :

- a. Pembagian tugas, peran, tanggung jawab dan wewenang masing-masing pengurus KTH;
- b. Penyusunan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) dan/atau aturan kelompok;
- c. Penetapan lokasi dan kelengkapan serta pengaktifan fungsi sekretariat;
- d. Penyusunan kelengkapan administrasi kelompok;
- e. pembuatan rencana kegiatan KTH;
- f. Peningkatan kapasitas SDM KTH
- g. Peningkatan kepedulian sosial, semangat kebersamaan, gotong royong, kejujuran, dan keterbukaan dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan kelompok.
- h. Pembagian peran, pembentukan kader dan regenerasi kepemimpinan dalam kelompok;  
Penyusunan laporan tahunan

Namun perlu menjadi perhatian juga bahwa kelemahan Penyuluh dalam melaksanakan penyuluhannya juga belum sepenuhnya didukung dengan beberapa alat peraga penyuluh sebagai media yang digunakan untuk pembinaan, pelatihan dan pembelajaran yang menjadi permasalahan sekarang ini. Maka dapat disimpulkan bahwa maju mundurnya kelembagaan kemasyarakatan tergantung pada penyuluhan yang menjadi ujung tombak permasalahan yang dihadapi, namun upaya-upaya sederhana tidak melemahkan kinerja mulia ini, karena pada dasarnya pengertian **“Sukses”** yang sebenarnya *“seseorang yang mampu dan bisa memberikan dampak kebaikan kepada orang lain hingga berhasil”* secara tidak langsungpun akan berdampak baik pula pada diri kita sebagai Penyuluh Kehutanan Swadaya Masyarakat (PKSM). Motivasi tersebut merupakan suplemen yang terkandung beberapa unsur ibadah dengan memiliki prinsip **“ sampaikanlah walaupun hanya satu ayat”**.

Semoga dengan karya tulis ini membawa dan menambah kesemangatan dalam berkarya baik melalui perkataan dan perbuatan yang bisa membawa perubahan kearah yang lebih baik, kelemahan dan kekurangan merupakan suatu proses pembelajaran yang harus dilalui untuk terus berbuat baik, demikian kiranya karya tulis ini saya buat dengan sangat sederhana semoga tidak mengurangi rasa syukur yang selalu Allah berikan.

Sobang, Nopember 2018

**KEGIATAN KERJA PKSM  
(ANJANGSANA, DISKUSI, REMBUK) DALAM MEMPERKUAT KELEMBAGAAN**



